

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL HIGIENIS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE

PRIMA IFANDRI

JOHNY A.F. KALANGI

WEHELMINA RUMAWAS

Abstrack : Regional retribution are levies other than taxes levied by local governments depending on the ability to provide services to the public. One of the retribution of local government retribution is traditional market retribution. Traditional market retribution constitute a payment for the provision of traditional / simple market facilities in the form of a court location or store that are provided or managed by the local government for the benefit and can be enjoyed by a particular community or entity.

Ternate City government, North Maluku Province is currently focusing on the development of goods and services sector. One of the efforts of the Ternate City government to encourage the improvement of trade and services sector is to build traditional markets. One of these markets is bahari berkesan traditional hygienic market.

The problem that arises is often a conflict between officers and traders. Many traders are allowed to sell not in accordance with the places that have been determined to make the market look neatly organized and create congestion. Slow settlement of infrastructure issues related to the comfort of the traders and the buyers.

The research method used in this study is a qualitative research method that aims to get more in depth information about how Implementation of Bahari Berkesan Traditional Hygienic Market Retribution Policy in Ternate City. Informants in this study as many as 9 informants. The results showed that the factors that play an important role in Implementation of Bahari Berkesan Traditional Hygienic Market Retribution Policy in Ternate City is communication, resources, attitude, and bureaucratic structure.

Kata Kunci : Implementation of the policy, retribution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi daerah merupakan pungutan selain pajak yang dipungut pemerintah daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pungutan retribusi pemerintah daerah yaitu retribusi pasar baik pasar tradisional maupun pasar moderen. Retribusi pasar tradisional adalah suatu pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran lokasi atau kios yang di berikan atau dikelolah oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat di nikmati masyarakat atau badan tertentu. Pasar tradisional merupakan tempat menilai tingkat perekonomian masyarakat, saat ini pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian tidak semua produk pertanian dapat dijual di toko-toko moderen sehingga keberadaan pasar tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian

sangat dibutuhkan dan masih menjadi pilihan dalam transaksi barang dan jasa (Purwanto, 2012). Salah satu upaya pemerintah Kota Ternate untuk mendorong peningkatan sektor perdagangan dan jasa adalah membangun pasar tradisional. Salah satu pasar tersebut yaitu Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi, disebutkan bahwa pungutan retribusi berdasarkan atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan fasilitas seperti MCK, kebersihan, serta tempat bongkar muat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda Kota Ternate No 5, 2014).

Permasalahan yang muncul adalah sering terjadi konflik antara petugas dan pedagang. Banyak pedagang yang dibiarkan berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan membuat pasar terlihat tidak tertata dengan rapih dan membuat kemacetan. Lambatnya penyelesaian permasalahan sarana prasarana yang berhubungan dengan kenyamanan pedagang dan pembeli. Berbagai permasalahan yang timbul dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan retribusi Pasar Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar belum berjalan maksimal.

Belum terwujudnya implementasi kebijakan retribusi pasar secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor pendukung proses implementasi kebijakan retribusi Pasar Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate yang berjalan kurang baik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi kebijakan retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini akan mampu menambah wawasan untuk memahami teori-teori yang dapat digunakan dalam proses implementasi kebijakan retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate.

2. Manfaat praktis

- a. Semoga penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak, yang membutuhkan penelitian ini. Juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu pemerintahan di Kota Ternate.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

KERANGKA TEORI

Federick sebagaimana yang dikutip oleh Agustino(2008), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

Menurut George C Edward yang dikutip Winarno (2016), faktor-faktor yang berperan dalam terwujudnya suatu implementasi kebijakan ialah: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi (Winarno, 2016).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi (Wiriyanto, 2006).

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan retribusi pasar tradisional ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah:

- a. Intensitas sosialisasi kebijakan retribusi pasar tradisional
- b. Kejelasan komunikasi kebijakan retribusi pasar tradisional dari para pelaksana.
- c. Konsistensi perintah - perintah kebijakan retribusi pasar tradisional.

2. Sumber Daya

Staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Latihan-latihan atau training dibutuhkan untuk diberikan kepada para pelaksana implementasi kebijakan sehingga kemampuan profesional mereka mengalami kenaikan (Winarno, 2016).

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar tradisional adalah:

- a. Kemampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan retribusi pasar tradisional.
- b. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan retribusi pasar tradisional.

3. Sikap

Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya akan timbul apabila individu di hadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual (Azwar, 2007).

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah :

- a. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan retribusi pasar tradisional
- b. Respon pelaksana kebijakan retribusi pasar tradisional
- c. Tindakan pelaksana kebijakan retribusi pasar tradisional

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando (Robbins, 2008).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah :

- a. Pembentukan struktur organisasi
- b. Pembagian tugas
- c. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate, yang diukur dari indikator-indikator yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Ternate pada bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

C. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini informan dipilih berdasarkan prinsip kesesuaian (*apropriatness*). Kesesuaian informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang dipilih menjadi informan ialah pedagang pelataran 2 orang, pedagang los 2 orang, pedagang kios 2 orang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Pasar), Kepala Bidang Pendataan Dan Penagihan, Kepala Dinas Pasar Kota Ternate.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan retribusi pasar tradisional higienis bahari berkesan Kota Ternate yang diukur dari indikator-indikator yaitu, komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil wawancara mendalam dengan informan.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh atau yang didapat dari observasi dan dokumentasi

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada setiap informan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung menggunakan pedoman kuisuioner.

2. Observasi

Melakukan pengamatan pada situasi penelitian yang berhubungan dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan, mengklasifikasi dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan penelitian.

G. Tehnik Analisis Data

Pengolahan data berdasarkan data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi secara langsung di lapangan, observasi dokumentasi yang diolah dan dianalisis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori - teori yang ada di kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dibuat dalam bentuk transkrip hasil wawancara mendalam.
2. Memilah-milah data yang tersedia sesuai kebutuhan.
3. Mereduksi data, menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisir data.
4. Merangkum data dan selanjutnya dianalisis memakai metode analisis isi (*content analysis*), yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada di kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Pasar Higienis Bahari Berkesan berlokasi di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Kota Ternate merupakan Kota Kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya adalah berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar $250,85 \text{ Km}^2$, sementara lautannya $5.547,55 \text{ Km}^2$. Kota Ternate seluruhnya di kelilingi laut dengan delapan buah pulau dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan laut Maluku
- b. Sebelah selatan dengan laut Maluku
- c. Sebelah timur dengan selat Halmahera
- d. Sebelah barat dengan laut Maluku.

Pasar Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate di resmikan pada tanggal 4 Juli 2013. Dalam visi Dinas Pasar Kota Ternate Mewujudkan Sarana dan prasarana serta meningkatkan penataan pasar secara efektif dan efisien guna peningkatan penerimaan retribusi pasar, sedangkan misi (1) meningkatkan kedisiplinan aparat atau petugas pengelolah pasar, (2) meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pasar, (3) meningkatkan kesadaran pengguna jasa pasar.

B. PEMBAHASAN

Faktor-faktor pendukung proses implementasi kebijakan retribusi Pasar Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi antara petugas retribusi dan pedagang berupa penyampaian informasi mengenai biaya retribusi pasar sesuai dengan lokasi tempat pedagang berjualan. Selain informasi tentang biaya retribusi petugas juga memberikan informasi tentang tata tertib berjualan dimana pedagang harus berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Ternate.

Petugas retribusi sebagai salah satu pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan sudah

jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Penyampaian informasi retribusi disampaikan langsung oleh petugas kepada pedagang dengan cara mendatangi pedagang di lokasi mereka berjualan. Selain itu petugas retribusi akan melakukan pertemuan berupa rapat dengan pedagang apabila ada kenaikan biaya retribusi. Para pedagang mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang retribusi pasar.

Penyampaian informasi bersifat konsisten sehingga tidak membingungkan dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pasar. Komunikasi yang buruk terjadi apabila para pedagang melanggar tata tertib selama berjualan di pasar. Hal tersebut memicu terjadinya konflik antara petugas dan pedagang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penagihan biaya retribusi oleh petugas diawasi oleh UPTD pasar. UPTD pasar mempunyai kewenangan dalam mengawasi penagihan biaya retribusi, mengawasi keamanan, dan kebersihan pasar. UPTD membentuk kordinator pasar yang akan mengawasi secara langsung proses penarikan biaya retribusi pasar. Petunjuk atau arahan tentang kewenangan UPTD dalam rangka implementasi kebijakan diperintahkan langsung oleh kepala Dinas Pasar Kota Ternate.

Komunikasi antara bidang terkait retribusi berjalan akurat. Untuk selalu menjaga komunikasi agar berjalan lancar selalu dilakukan rapat evaluasi bersama dengan pejabat dari bidang yang bersangkutan. Rapat tersebut untuk mendapatkan informasi dari masing-masing bidang, dimana dalam rapat tersebut juga dilaksanakan penyusunan perencanaan program, rencana pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Informasi melewati lapisan hierarki birokrasi melalui rapat evaluasi bersama. Instruksi-instruksi yang jelas dan konsisten dapat tersalurkan kepada para pelaksana. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan untuk dijalankan.

Kendala yang didapat dari masing-masing bidang yaitu ada yang menanggapi cepat dan ada yang lambat. Lambatnya pelaksanaan instruksi membuat pelaksanaan tugas dalam mewujudkan implementasi kebijakan retribusi masih belum maksimal.

2. Sumber daya

Tugas dari petugas retribusi antara lain yaitu menagih biaya retribusi dan mengatur para pedagang agar tertib selama berjualan. Petugas dinilai belum maksimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan retribusi. Hal tersebut ditandai dengan para petugas yang membiarkan para pedagang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh dinas pasar. Petugas retribusi harusnya mengetahui apa yang harus mereka

lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Diperlukan ketaatan petugas terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat. Ketidak sesuaian tempat berjualan tersebut membuat pedagang lain yang taat aturan merasa tidak adil dan dirugikan.

Pedagang yang melanggar aturan, berjualan di badan jalan membuat pasar terlihat tidak tertata dengan rapi dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, para pedagang yang melanggar aturan sulit untuk dipindahkan ke tempat berjualan yang telah disediakan oleh dinas pasar.

Program-program kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia masih berupa wacana dan belum pernah teralisasi. Pelaksana kebijakan harus mempunyai kualitas dan keterampilan-keterampilan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pelatihan-pelatihan yang minim menyebabkan kemampuan profesional menjadi rendah. Hal ini berdampak pada kinerja para staf pemerintahan di dinas pasar. Kurangnya kualitas kinerja staf membuat implementasi kebijakan retribusi pasar belum mencapai target maksimal.

Kewenangan staf harus sesuai dengan bidang masing-masing dan berdasarkan arahan dari pimpinan. Arahan dari pimpinan untuk mewujudkan implementasi kebijakan diwujudkan melalui rapat struktural.

Sumber daya lainnya seperti fasilitas fisik pasar masih sangat kurang. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya masih belum sepenuhnya terwujud.

3. Sikap

Sikap petugas pasar dalam pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang meliputi ketertiban dan keamanan pasar telah dilakukan dengan baik. Sikap tegas sering ditunjukkan petugas apabila pedagang tersebut tidak mengikuti aturan selama berjualan di pasar.

Sikap petugas pasar dalam pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana pasar untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang didapatkan yaitu masalah kebersihan terutama pada daerah pelataran dan los. Hanya pedagang kios yang menyatakan tempat berjualan yang mereka tempati sering didatangi petugas untuk dibersihkan.

Tidak terdapat masalah berarti mengenai sikap petugas retribusi selama para pedagang membayar biaya retribusi. Sikap kasar dilakukan petugas kepada pedagang apabila pedagang tidak mengikuti aturan dan melanggar tata tertip saat berjualan sehingga memicu terjadinya benturan antara pedagang dan petugas dinas pasar .

Sikap anggota dalam pelaksanaan program tindak lanjut kebijakan yang meliputi ketertipan dan keamanan pasar melalui arahan dari kepala UPTD dengan membagi berdasarkan wilayah yang telah ditentukan. Penjagaan keamanan di tiap wilayah menggunakan jasa dari warga umum yang bermukim di daerah sekitar pasar. Keamanan pasar dirasakan oleh para pedagang cukup baik dimana ada petugas keamanan yang berjaga selama pasar beroperasi.

Sikap pelaksana dalam pendataan dan penagihan yaitu melaksanakan perintah sesuai dengan tupoksi kerja yaitu melakukan penagihan biaya retribusi kepada pedagang sesuai dengan tempat yang disewa.

Sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi bervariasi. Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan retribusi pasar masih belum maksimal karena kurangnya kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang mengarah ke suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan mengacu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung mengarah pada pengelolaan pasar yang baik untuk mewujudkan implementasi kebijakan retribusi pasar.

Upaya yang dilakukan oleh staf dinas pasar terhadap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dan prasarana pasar dengan cara melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas pasar.

4. Struktur birokrasi

Alur dan tata cara penagihan retribusi pasar dibagi menjadi dua yaitu penagihan harian dan penagihan kontrak. Penagihan harian melalui petugas di lapangan dimana tiap harinya ada petugas menagih biaya retribusi kemudian uang hasil penarikan biaya retribusi akan dibawa ke kordinator pasar selanjutnya kordinator akan membawa ke bendahara dinas pasar. Penagihan kontrak biasanya langsung dibayarkan kordinator pasar kemudian akan dibawa ke dinas pasar.

Tata cara penyetoran retribusi mulai dari petugas penagih kepada kordinator pasar. Untuk pedagang yang mengontrak kios akan dibayarkan langsung ke kordinator yang akan di bawa ke bendahara pasar. Biasanya untuk pedagang yang mengontrak kios akan membayar biaya retribusi langsung selama enam bulan ke depan atau sampai satu tahun. Untuk pembayaran dengan biaya yang besar langsung dibayarkan kepada bendahara dinas pasar tidak melalui petugas.

Pengelolaan biaya retribusi akan langsung dimasukkan ke kas daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fasilitas pasar dan revitalisasi pasar.

Proses pembayaran retribusi pedagang pelataran dan pedagang los dapat melalui pembayaran langsung lewat petugas retribusi. Pembayaran biaya retribusi untuk pedagang kios yang nominal pembayarannya terbilang lebih besar dan dibayarkan tiga bulan sekaligus dapat langsung membayar ke dinas pasar.

Pelaksanaan pelayanan pasar dalam penarikan retribusi daerah dilakukan oleh setiap koordinator sesuai dengan tupoksi kerjanya masing-masing. Peran UPTD untuk melakukan pemantauan dan melakukan sosialisasi terkait biaya retribusi sesuai dengan kebijakan retribusi yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Struktur birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Dalam pengelolaan kebijakan yang kompleks diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerjasama orang-orang atau sumber daya di dalamnya secara efektif (Sukowati, 2014).

Struktur organisasi untuk mendukung terwujudnya implementasi retribusi salah satunya struktur UPTD sebagai struktur terdepan dalam mencapai target terwujudnya implementasi retribusi namun pelaksanaannya masih belum efektif.

Kordinasi bagian pendataan dan penagihan retribusi dengan cara memberi target kepada UPTD untuk penarikan biaya retribusi sesuai dengan data pedagang yang telah ada yaitu 70-80 juta perbulan. Dan pada bulan Januari penarikan biaya retribusi mencapai 100 juta.

Pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dengan mengkordinasikan hal-hal teknis dengan jajaran dinas terkait, mengevaluasi bersama mengenai sarana prasarana dan mengimplementasikannya sesuai dengan tugas masing-masing.

Masalah yang dihadapi adalah ketidakpatuhan pedagang dalam membayar biaya retribusi sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada pedagang dengan mendatangi langsung pedagang untuk memberi arahan agar timbul kesadaran dari pedagang untuk melakukan kewajibannya membayar biaya retribusi pasar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate antara lain komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

1.Komunikasi

Komunikasi yang telah dilaksanakan secara umum telah dijalankan dengan baik. Komunikasi yang buruk terjadi apabila pedagang melanggar aturan sehingga sering menimbulkan konflik dengan pelaksana kebijakan.

2.Sumber daya

Kualitas kinerja pelaksana kebijakan masih kurang karena para pelaksana tidak pernah diikutsertakan dalam pelatihan. Hal tersebut membuat implementasi kebijakan retribusi pasar belum mencapai target maksimal.

3.Sikap

Petugas pasar dalam pelaksanaan program tindak lanjut dan implementasi kebijakan pada umumnya telah dilakukan dengan baik. Namun masih terdapat pembiaran terhadap para pedagang yang berjualan tidak sesuai pada tempat yang telah ditentukan oleh dinas pasar yang menyebabkan pasar terlihat tidak tertata dengan baik.

4.Struktur birokrasi

Pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan telah diatur dengan baik. Namun pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati ada yang menganggangi lambat sehingga proses perwujudan implementasi tidak berjalan maksimal.

SARAN

1.Komunikasi

Perlu dilakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi pasar

2.Sumber daya

Para pegawai perlu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.Sikap

Pengawasan langsung di lapangan sangat diperlukan guna mendapatkan gambaran kinerja pelaksana sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera dikoreksi untuk kemajuan dalam mewujudkan implementasi kebijakan.

4.Struktur birokrasi

Peningkatan kerjasama antara bidang-bidang terkait dalam menjalankan perintah dengan cara cepat dan tepat melaksanakan prosedur yang telah disetujui dalam rapat evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anonymous. 2014. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pemerintah Kota Ternate.
- Azwar, S. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, W. 2012. Analisa Persaingan antara Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Studi Kasus Di Kawasan Ciledug Tangerang. *Jurnal MIX*, Volume 5 No.3, Oktober 2012.
<http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1063/1/FULL%252BAnalisa%252BPersaingan%252BAntara%252Bpasar.pdf>. Diakses: 15 Oktober 2016.
- Robbins, Stephen, P. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukowati, N. 2014. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan Spm). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
(<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/178/158>). Diakses 10 April 2017.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Wiryanto. 2006. *Teori Komunikasi Massa*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi.